

KONSTRUKSI SURAT KABAR KOMPAS TERHADAP KEBIJAKAN AFIRMATIF CALON LEGISLATIF PEREMPUAN

Fadjarini Sulistyowati
Program Studi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD”
Jl. Timoho 317 Yogyakarta, 55221
e-mail: dzarbela@yahoo.co.id

Abstract

News does not reside in value-free space. Mass media are powerful to make reality construction to publish that is in line with their frame (point of view). Constitution Court has made a decision that cancels chapter 214 of the Constitution, Number 10/2008, by which candidates in the legislative general election of 2009 are elected by majority votes, and not by their numbers in rank, causing the affirmative policy for women candidates of legislative members fall invalid. As a result of the absence of affirmative policy, women candidates have to work harder to become members of the parliament. As public space, mass media are supposed to be strategic room to help women candidates campaign their struggle. Not all mass media, however, have gender sensitivity. One among few mass media that are concerned with women's struggle is Kompas, whose column, Swara, is gender sensitive. This research is intended to find out Kompas's construction of post Constitution Court's decision news concerning the affirmative policy for women candidates and women's struggle to become members of People's Representatives/District People's Representatives. The method of analysis used in this research is framing analysis of Zhondang Pan and Konsicki. The research result shows that Kompas is concerned with women candidates' struggle. In broad outline, the post Constitution Court's decision news is divided into two groups; they are the discourse about the affirmative policy for women candidates and the women candidates' struggle in the general election of 2009.

Key words: mass media, affirmative policy, women, construction

Pendahuluan

Upaya gigih gerakan perempuan untuk tetap bersikukuh merealisasikan bentuk konkret peran perempuan pada sektor publik laksana perjuangan yang tidak pernah kunjung usai. Pada sektor politik, isu penting yang terus mereka dorong adalah kebijakan afirmatif (*affirmative action*) berupa kuota 30% kursi di parlemen diisi oleh politisi perempuan. Isu kebijakan afirmatif mulai gencar diusulkan pada tahun 2002 yang kemudian berhasil diakomodasi dan menghasilkan kebijakan afirmatif dalam Pemilu 2004. Ternyata, pada Pemilu 2004, buah dari kebijakan afirmatif tersebut hanya mampu menyertakan 11% perempuan di DPR, 9% di DPRD provinsi, dan

6% di DPRD kabupaten/kota, (Kompas, 25 Agustus 2008).

Kebijakan afirmatif yang diformulasikan kuota 30% memang bukan perjuangan yang mudah dan sederhana. Kebijakan afirmatif memunculkan banyak perdebatan pro-kontra. Para pendukung kebijakan afirmatif memiliki rasionalisasi bahwa sudah seharusnya muncul kebijakan (baca: afirmatif) terhadap perempuan. Hal ini karena peran mereka yang sangat kecil dalam kehidupan politik sehingga bila direpresentasikan melalui parlemen masih merupakan ketidakberimbangan terlebih bila dikomparasikan dengan fakta rasio jumlah penduduk laki-laki-perempuan. Implikasinya, terutama, isu-isu yang dihadapi

perempuan tidak terartikulasikan secara memadai di parlemen.

Pada kondisi sosial politik di Indonesia memperlihatkan kecenderungan kuat bahwa sekadar menyerahkan keterwakilan perempuan semata-mata dengan cara melangsungkan pertarungan yang fair (melalui pemilu) terbukti tidak kontributif terhadap posisi perempuan di parlemen.

Pada sisi lain, tidak sedikit pula pandangan yang beranggapan bila perempuan menyatakan kesetaraan yang sama dengan laki-laki, maka konsekuensinya mereka sudah selayaknya tidak memerlukan kebijakan afirmatif yang berpihak. Keberpihakan itu justru diartikan pengaburan atas makna kesetaraan laki-laki-perempuan. Kebijakan afirmatif terhadap perempuan berupa kuota 30% ini akhirnya berhasil ditetapkan sekalipun diiringi perdebatan yang tidak sepenuhnya tuntas. Namun, kebijakan afirmatif yang semula melegakan aktivis gerakan perempuan tidak bertahan lama, Pada Pemilu 2009, keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal 214 UU No. 10/2008 sehingga calon legislatif terpilih pada Pemilu 2009 tidak bisa didasarkan atas nomor urut namun harus meraih suara terbanyak.

Bagi gerakan perempuan keputusan MK ini memberikan implikasi negatif yang cukup besar pada calon legislatif perempuan. Apabila dalam Pasal 554 UU No. 10/2008 dinyatakan, sedikitnya dari setiap tiga calon yang diajukan oleh partai politik, salah satu di antaranya adalah calon legislatif perempuan maka penerapan pasal ini menjadi batal karena penetapan calon terpilih tidak lagi berdasarkan sistem nomor urut melainkan suara terbanyak.

Kebijakan afirmatif terhadap perempuan di parlemen menjadi tidak berlaku dalam pemilu 2009 ini. Bagi aktivis gerakan perempuan keputusan MK ini dinilai telah menghancurkan kebijakan afirmatif yang mereka perjuangkan sejak 2002. Menurut Ani Soetjipto, kebijakan afirmatif bagi perempuan di Indonesia masih diperlukan karena masih minimnya jumlah perempuan di parlemen yang tentunya akan berefek pada minimnya kebijakan yang hadir untuk perlindungan perempuan, (Kompas 10 februari 2009).

Keputusan MK ini menjadikan posisi calon legislatif laki-laki dan perempuan setara,

tanpa ada kuota yang dikuatkan ketentuan yuridis. Politisi atau caleg perempuan untuk mendapatkan raihan suara terbanyak maka terpaksa harus berjuang ekstra. Karena, bagaimana pun posisi mereka cenderung lebih lemah –untuk itulah isu kebijakan afirmatif memiliki relevansinya— baik dari segi kekuatan finansial maupun kemampuan mengorganisasikan massa (selama ini dikonsentrasikan pada wilayah privat). Ketika negara tidak memberikan kebijakan afirmatif terhadap caleg perempuan maka, korelasinya adalah semakin sempit pula ruang gerak perempuan untuk menunjukkan perannya di sektor publik.

Media massa memiliki pengaruh dalam pembentukan opini. Kebijakan media menyediakan ruang bagi perempuan yang merupakan ruang publik memiliki kontribusi mendorong mereka dalam menyampaikan informasi dan isu-isu perempuan. Kemampuan gerakan perempuan untuk mengakses dan menjaga relasi media tentu sesuatu yang positif bagi perjuangannya. Sesuai dengan pendapat George Gerbner (dalam Dewi Novianti, 2006) media massa itu mampu menciptakan khalayak-khalayaknya membuat definisi terhadap isu-isu, membuat istilah-istilah yang umum dari suatu pengetahuan sehingga dengan demikian media massa itu dapat menarik perhatian dan memiliki kekuatan.

Bila kebijakan negara tidak mereka dapatkan, maka media massa seharusnya menyediakan ruang bagi mereka untuk dapat menyampaikan informasi kepada publik. Apalagi, ternyata, dari keseluruhan jumlah pemilih yang terdata, 57% pemilih adalah perempuan (Kompas, 31 Januari 2009).

Selain itu kemampuan media menyihir pembacanya menurut Gamson dan Modigliani (dalam Sudibyo, 2001: 187) karena media dapat menerapkan standar kebenaran, matrik objektivitas serta batasan-batasan etika tertentu dalam mengolah dan menyuguhkan berita. Untuk itu media memiliki kemampuan dalam menyajikan fakta dengan konstruksi mereka.

Melalui harian Kompas yang memuat berita-berita tentang calon legislatif perempuan, peneliti mencoba melihat bingkai yang digunakan media tersebut. Kompas sebagai media cetak, merupakan media yang sudah cukup memiliki

pengalaman dan dianggap media yang cukup independen. Dalam keberpihakannya terhadap perempuan, Kompas menyediakan ruang khusus yakni Swara untuk menyajikan informasi khusus tentang gerakan perempuan. Untuk itulah, Kompas dalam memberitakan kebijakan afirmatif calon legislatif perempuan seharusnya memiliki kebijakan yang berpihak agar suara mereka lebih bisa didengar masyarakat luas.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini ingin mengetahui bagaimanakah konstruksi harian Kompas terhadap berita-berita kebijakan afirmatif calon legislatif perempuan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilu 2009?

Ada tiga argumen yang mendukung untuk keterwakilan perempuan dalam dunia politik (Joni Lovensduki, 2005:48-52): *pertama*, argumen keadilan, yang menyatakan bahwa sangatlah tidak adil jika kaum laki-laki memonopoli perwakilan terutama di suatu negara yang menganggap dirinya sebagai negara demokrasi; *kedua*, argumen pragmatis, yang memanfaatkan gagasan mengenai para politisi rasional yang memaksimalkan jumlah suara. Argumen ini mendorong isu bahwa dengan keterwakilan perempuan maka politik akan menjadi lebih konstruktif dan ramah; *ketiga*, argumen perdebatan, yang intinya memiliki pandangan bahwa perempuan akan membuat gaya dan pendekatan yang berbeda dalam politik sehingga akan mengubahnya menjadi lebih baik dan menguntungkan semua pihak.

Salah satu alasan logis yang senantiasa disampaikan para feminis, upaya untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada perempuan adalah dengan menempatkan perempuan dalam posisi pengambil kebijakan itu sendiri atau dalam keterwakilan politik. Seperti yang disampaikan oleh Barbara B. Watson (dalam Dzuhayatin, 1996: 88-89) kunci pemberdayaan perempuan adalah peran dan kedudukan. Sedangkan peran merupakan seperangkat tindakan dan tingkah laku yang ditentukan oleh norma, hukum dan kekuasaan. Kedudukan, adalah suatu posisi yang disediakan lingkungan dan memiliki pengaruh dan akibat terhadap individu atau kelompok.

Di Indonesia, perjuangan perempuan untuk

masuk ke wilayah publik mempunyai kendala cukup besar karena faktor budaya yang memosisikan perempuan di wilayah privat. Untuk itu, Fakih (2001: 180) menyatakan bahwa persoalan paling besar yang memberikan sumbangan pada kegagalan memperjuangkan hak asasi perempuan adalah faktor substansi kebijakan negara dan juga lemahnya kesadaran kritis kaum perempuan sendiri. Dan ini didukung pendapat Mernissi (1999: 14-16) yang mengatakan ia mendapati tidak terorganisirnya perempuan menjadi kendala utama. Oleh sebab itulah mengapa kelompok masyarakat perempuan tidak mempunyai kekuasaan sehingga amat mudah menjadi target strategis para birokrat dalam melumpuhkan kemerdekaan sipil perempuan untuk turut serta menentukan persoalan-persoalan publik.

Joni Lovendski (2005: 88) menyampaikan hambatan perempuan untuk masuk politik sebagai rintangan sosial perempuan. Menurutnya, perempuan mengalami tiga rintangan sosial untuk menjadi pelaku politik: *pertama*, sumber daya yang diperlukan untuk memasuki politik yang mereka miliki lebih lemah; *kedua*, bermacam-macam kekangan gaya hidup menyebabkan perempuan memiliki waktu lebih sedikit daripada laki-laki dan *ketiga*, tugas dunia politik diasumsikan sebagai dunia laki-laki sehingga merintangi rekrutmen mereka untuk masuk.

Seperti yang disampaikan Mernissi dalam Dody Riyadi (2005: 13) ada dua hal yang bisa dilakukan perempuan untuk melakukan perjuangan di ruang publik (politik): *pertama*, dibutuhkan keberadaan organisasi yang kuat, mandiri, rasional, partisipatif, dan bebas dari bias cara pandang laki-laki; *kedua*, kecerdasan melakukan wacana atau pendominasian ide-ide transformatif dalam berbagai bentuknya.

Untuk memunculkan organisasi perempuan yang kuat yang bisa mendukung gerakan perempuan bukanlah sesuatu yang mudah. Organisasi perempuan kebanyakan memiliki problem yang hampir seragam yakni kualitas SDM dan ketergantungan terhadap lembaga donor. Sehingga organisasi perempuan yang cukup efektif memperjuangkan hak-hak perempuan tidaklah banyak. Selain itu, upaya yang lain dengan selalu mengkampanyekan gerakan perempuan melalui

media massa.

Peran media massa adalah menyampaikan informasi kepada publik berdasarkan peristiwa dan pendapat yang terjadi dalam masyarakat. Media massa menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi wacana yang memiliki makna. Media massa merupakan institusi yang memiliki kekuatan untuk mengkampanyekan apa saja, termasuk gerakan perempuan. Namun media bukanlah ruang hampa sehingga untuk mengharapkan kerja jurnalisme dalam praktiknya sesuai dengan elemen-elemen jurnalisme pada kenyataannya menghadapi kompleksitas tertentu. Pada satu sisi media membentuk realitas politik, tetapi bersamaan dengan itu pada di sisi lain, realitas politiklah yang memengaruhi media. Hal yang sama juga terjadi pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Proses itu disebut Grossberg (1998: 7), merupakan *mediamaking*. Terminologi *mediamaking* menyiratkan bahwa ketika media dibentuk pada saat yang bersamaan media membentuk sesuatu yang lain.

Demikian pula dalam pembuatan berita, sesuai dengan pendapat Pamela J. Shoemaker dan Stephen D Reese (dalam Sudibyo, 2003: 13), proses pembikinan berita (*newsroom*) bukanlah ruang hampa dan netral namun ada beberapa hal yang mempengaruhi: Pertama, faktor individual, yakni faktor yang berhubungan dengan latar belakang profesional. Level individual akan berpengaruh pada aspek-aspek personal dari pengelola media misalnya: agama, umur, dan jenis kelamin. Kedua, faktor level rutinitas media yakni berhubungan dengan mekanisme dan rutinitas penentuan berita. Setiap media memiliki ukuran sendiri tentang apa yang disebut berita, ciri-ciri berita, ukuran kelayakan berita dan kesemuanya ini sudah menjadi rutinitas media. Ketiga, faktor level organisasi, berhubungan dengan struktur organisasi yang secara hipotetik mempengaruhi pemberitaan. Pengelola media dan wartawan bukanlah orang yang tunggal yang ada dalam organisasi berita sebaliknya, ia hanyalah bagian kecil dari organisasi media. Keempat, level ekstra media yang meliputi: sumber berita, sumber penghasilan, pihak eksternal dan faktor ideologi.

Media bukan sebagai saluran yang bebas dan netral karena media bisa menjadi alat dari

kelompok dominan tetapi media juga memproduksi ideologi dominan. Media membantu kelompok dominan menyebarluaskan gagasannya, mengontrol kelompok lain dan membentuk consensus (Eriyanto, 2006: 36). Sehingga, media juga memiliki kekuatan untuk mengkonstruksikan realitas sesuai dengan keinginan mereka. Menurut Tony Bennet (dalam Eriyanto, 2006: 36), media adalah agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya.

Konstruksi media sangat dipengaruhi bahasa. Bahasa adalah unsur utama dalam penyajian pesan lewat media massa. Bahasa adalah instrument utama untuk menceritakan realitas, bahasa ini meliputi bahasa verbal (kata-kata tertulis atau lisan) maupun bahasa nonverbal (gambar, foto, gerak-gerik, grafik, angka dan tabel), Ibnu Hamad (2004: 11-12)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan metode analisis isi dengan konteks *framing*. Berbeda dengan analisis isi konvensional maka analisis *framing* lebih melihat pesan sebagai hasil konstruksi.

Objek analisis dalam penelitian ini adalah teks berita calon legislatif perempuan pada masa kampanye Pemilu 2009 di Harian Kompas. Digunakannya analisis teks berita karena data teks bisa merupakan cerminan situasi dan kondisi yang dikonstruksi media. Harian Kompas dipilih karena dianggap sebagai koran independen dan merupakan salah satu media yang memiliki keberpihakan terhadap perempuan. Periode waktu yang dipilih antara bulan Desember 2008 (saat keputusan MK keluar) hingga tanggal 5 April 2009 (masa kampanye selesai). Data yang dikumpulkan sejak bulan Desember hingga Maret 2009. Berita yang dipilih adalah berita langsung (*straight news*). Berdasarkan data berita tentang calon legislatif perempuan dengan mengangkat dua tema utama yakni: kebijakan afirmatif pasca putusan MK dan perjuangan calon legislatif perempuan dalam masa pemilu 2009.

Teknik analisis data menggunakan analisis framing yang disampaikan oleh Zhongdang Pan dan Kosicki. Pan dan Kosicki membuat suatu model dengan mengintegrasikan secara bersama-

sama konsep psikologis dengan konsepsi sosiologis. Dalam pendekatan ini perangkat *framing* dapat dibagi ke dalam empat struktur besar: *pertama*, struktur sintaksis, struktur ini berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa. Struktur semantik, dapat diamati dari lead, latar lead dan sebagainya. *kedua*, struktur skrip berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan peristiwa ke dalam bentuk berita. *ketiga*, struktur tematik, berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa dalam proposisi, kalimat atau hubungan antar kalimat. *keempat*, struktur retorik, berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Keberpihakan Kompas terhadap Kebijakan Afirmatif Perempuan

Berdasarkan analisa berita, tampak keberpihakan Kompas untuk mendukung perjuangan caleg perempuan. Keberpihakan Kompas bukan hanya muncul pada berita-berita *straight news* tetapi pada analisis Politik, yang disampaikan oleh J. Kristiadi dan juga pada forum spanduk caleg. Analisis politik J. Kristiadi dengan judul *Suara Terbanyak dan Nasib Perempuan* pada tanggal 27 Januari 2009, yang secara eksplisit mendukung kebijakan afirmatif pada caleg perempuan.

Pada tema-tema berita yang berkaitan dengan kebijakan afirmatif caleg perempuan, tampak kebimbangan Kompas. Secara garis besar Kompas pada prinsipnya mendukung Keputusan MK karena keputusan suara terbanyak sesuai dengan prinsip demokrasi. Salah satu contoh kebimbangan Kompas bisa dilihat pada analisis berita dengan judul: “Putusan MK merugikan caleg perempuan”.

Dalam berita ini, Kompas menganggap kebijakan MK memiliki implikasi terhadap caleg perempuan namun, suara pemilih merupakan hal yang penting sehingga keputusan MK yang mengakomodasi suara terbanyak sangat sesuai dengan prinsip demokrasi. Ada dua hal yang disampaikan Kompas, yakni keberpihakan pada suara perempuan dengan menyebutkan adanya

implikasi terhadap caleg perempuan namun suara mayoritas —kebanyakan laki-laki— perlu diapresiasi karena begitulah konsep negara demokrasi, suara rakyat suara Tuhan.

Dari hal ini tampak Kompas sebagai media massa mencoba melakukan frame namun secara samar. Sebagai media yang memang memiliki kepedulian terhadap perempuan Kompas masih menyuarakan suara gerakan perempuan, hal ini tergambar jelas dari judul:....*merugikan caleg perempuan*. Keberpihakan Kompas terhadap caleg perempuan secara skematik tampak dalam pemilihan narasumber dan panjangnya kutipan masing-masing narasumber. Penempatan pernyataan Eva Kusuma sebagai judul merupakan skematik yang diarahkan Kompas terhadap teks berita ini. Demikian juga dalam *lead*nya, kutipan dari Eva Sundari disampaikan secara lengkap, berikut lead berita tersebut:

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pemakaian sistem nomor urut dalam penetapan calon anggota legislatif dinilai merugikan caleg perempuan. Pasalnya penghapusan sistem nomor urut membuat perlakuan khusus terhadap perempuan melalui kuota 30 persen tidak efektif. Putusan ini dinilai melanggar nilai patriarkhis.

Kompas yang memiliki sikap pro demokrasi, mengkonstruksikan bahwa keputusan MK sebagai bukan sebagai keputusan keliru karena, keputusan ini mengembalikan kedaulatan pemilih sesuai dengan konsep negara demokrasi. Sehingga, Kompas dalam teks berita ini tidak menempatkan MK sebagai pihak yang turut memberikan andil dalam mengeluarkan putusan yang merugikan perempuan. Walaupun dalam judul berita dicantumkan *Putusan MK merugikan caleg perempuan* namun ditepis pada alenia kelima, yakni adanya pernyataan dari MK yang mengatakan mereka tidak membatalkan ketentuan tentang kuota 30 persen.

Dari hal tersebut sebetulnya Kompas mendukung kebijakan afirmatif karena kebijakan ini memang seharusnya tidak dihilangkan sesuai dengan pernyataan MK. Dengan demikian MK dikonstruksikan Kompas sebagai pihak yang tidak bersalah namun dalam teks ini KPU lah yang

dibingkai Kompas sebagai lembaga yang tidak siap mengantisipasi kasus-kasus Pemilu. Kutipan KPU yang ditempatkan di akhir teks, semakin menguatkan asumsi bahwa bagi Kompas pernyataan dari KPU tidaklah terlalu penting. KPU dianggap tidak bisa memberikan penjelasan yang bisa menjawab keresahan caleg perempuan.

Dilihat dari skrip, teks ini disusun bukan didasarkan atas peristiwa tetapi teks berita ini merupakan pendapat-pendapat yang dikumpulkan dari beberapa narasumber yang dipilih Kompas. Pemicu utama kemunculan teks ini adanya gerakan dari para aktivis pergerakan perempuan untuk menolak putusan MK dua hari sebelumnya. Kompas sengaja memilih isu penolakan dari aktivis perempuan terhadap putusan MK sebagai ujud keberpihakan Kompas terhadap pemberdayaan perempuan.

Kompas sebagai media bukanlah bebas nilai namun sesuai Shoemaker dan Stephen D Reese (dalam Sudibyo, 2003: 13), proses pembikinan berita (*newsroom*) bukanlah ruang hampa dan netral, Kompas membingkai berita dengan tujuan ikut memberikan dukungan untuk memperjuangkan kebijakan afirmatif apalagi didukung dengan alasan yang ada pada pernyataan Eva Sundari Secara tematik, keputusan MK dapat muncul tanpa adanya kebijakan afirmatif terhadap perempuan karena dunia politik dianggap sebagai dunia laki-laki yang tidak berfikir untuk mengakomodasi keberpihakan, demikian makna yang muncul ketika Kompas mengambil pernyataan Eva Sundari "Putusan itu dinilai melanggar nilai patriarkhis". Kata *Patriarkhis*, bermakna bagaimana dunia ini dibentuk sesuai budaya yang berpihak laki-laki. Pandangan ini muncul dari gerakan feminisme, Kompas mengarahkan *angle* berita pada pandangan ini. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan aktivis perempuan, "Perempuan butuh upaya afirmatif di lembaga legislatif karena kondisinya saat ini tidak berimbang". Kata *tidak berimbang* memiliki makna adanya ketimpangan antara dunia laki-laki dan perempuan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Joni Lovendsuki yang menyampaikan hambatan perempuan untuk masuk politik sebagai rintangan sosial perempuan. Salah satunya adalah persepsi

bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki. Untuk itu, perjuangan perempuan memang menjadi berat sehingga kebijakan afirmatif menjadi penting untuk dikeluarkan.

Bingkai Kompas untuk pro kebijakan afirmatif semakin jelas bila dilihat dari retorik teks berita yang muncul di penggunaan kata-kata tertentu, misalnya kata yang mengesankan hiperbola: *runtuh, digembosi, putus tengah jalan*. Keputusan MK menjadi penghalang karena dianggap telah melemahkan upaya-upaya perjuangan untuk menempatkan posisi perempuan di level kebijakan. Dengan penggunaan kata-kata ini memperkuat asumsi perjuangan perempuan telah menemui jalan buntu tanpa adanya kebijakan afirmatif.

Kompas Mendukung Usaha-Usaha Caleg Perempuan

Kompas dalam pemberitaan kampanye para caleg perempuan memiliki keberpihakan yang tinggi. Hal ini tampak dari perhatian Kompas terhadap usaha-usaha calon legislatif perempuan, salah satunya dapat dilihat pada berita dengan judul: "Perempuan harus turun ke lapangan" yang dimuat harian Kompas pada tanggal 22 Januari 2009.

Kompas menekankan pentingnya keberadaan perwakilan perempuan di dalam DPR/DPRD karena perempuan memiliki kompetensi seperti halnya laki-laki. Kompetensi perempuan seringkali tidak muncul terutama bila mereka hanya berdiam diri. Untuk itu melalui kalimat "Perempuan harus turun ke lapangan", Kompas mendorong mereka untuk turun menyapa massa mereka. Dukungan Kompas dilanjutkan dalam *lead* berita:

Sistem pemilu yang menerapkan suara terbanyak saat ini harus dihadapi dengan kerja keras keberanian untuk terjun ke lapangan di setiap daerah pemilihan.

Pada teks ini Kompas tampaknya sengaja tidak menggunakan kata caleg perempuan namun digantikan kata perempuan. Kata ini dipakai sebagai upaya mendukung bahwa perjuangan caleg perempuan ini sama halnya dengan perjuangan kaum perempuan secara keseluruhan. Pada *lead*, Kompas memberi penekanan posisi semua caleg

dengan sistem suara terbanyak adalah sama, sehingga perempuan bila ingin berhasil juga harus melakukan kerja keras. Dorongan Kompas terhadap pemberdayaan masih muncul pada alenia ketiga:

Selain itu, kalangan perempuan yang didukung para aktivis perempuan bisa mengajukan berbagai upaya hukum untuk langkah lain agar keterwakilan perempuan di parlemen dapat meningkat.

Melalui berita ini Kompas sengaja membingkai bahwa kebijakan hukum untuk perlindungan caleg perempuan tetap harus dilakukan dan perjuangan itu menjadi tugas utama perempuan. Tujuan utama dari semua upaya ini agar ada peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Keterwakilan perempuan dalam parlemen memiliki peran strategis untuk penentuan kebijakan.

Keterwakilan perempuan menempatkan peran dan status perempuan menjadi lebih dihargai sesuai dengan pendapat para feminis, upaya untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada perempuan adalah dengan menempatkan perempuan dalam posisi pengambil kebijakan itu sendiri atau dalam keterwakilan politik. Seperti yang disampaikan oleh Barbara B. Watson, kunci pemberdayaan perempuan adalah peran dan kedudukan. Peran merupakan seperangkat tindakan dan tingkah laku yang ditentukan oleh norma, hukum dan kekuasaan. Sedangkan kedudukan, adalah suatu posisi yang disediakan lingkungan dan memiliki pengaruh dan akibat terhadap individu atau kelompok. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan inilah Kompas mendorong usaha-usaha caleg perempuan.

Secara keseluruhan teks berita ini, menempatkan keberpihakan Kompas pada perjuangan perempuan. Narasumber berita ada empat orang yang semuanya perempuan baik dari aktivis, akademisi maupun caleg perempuan sendiri. Pernyataan Lena Maryana diletakkan sebagai judul dan *lead*. Penempatan ini dimungkinkan karena Kompas menilai pernyataan Lena bisa mendorong caleg perempuan untuk tetap optimis dan pernyataan ini sesuai dengan bingkai Kompas

terhadap pemberdayaan perempuan. Lena Maryana cukup kritis memberikan pendapat dan meminta KPU untuk turut memperjuangkan keterwakilan perempuan. Pernyataan Lena Maryana ini diperkuat dari kalangan akademisi perempuan yang berpihak pada perjuangan perempuan, Ani Sutjipto dan anggota LSM perempuan, Aisah Putri.

Dilihat dari skrip, teks berita ini merupakan pengembangan dari acara dialog publik “Representasi perempuan pasca uji materi” yang salah satu narasumbernya Lena Maryana, sehingga berita ini juga memfokuskan pada pernyataan Lena yang kemudian diperdalam dengan menambahkan wawancara kepada narasumber lain. Dari hal ini, berarti Kompas sengaja untuk memfokuskan pada sudut pandang yang berpihak pada pemberdayaan caleg perempuan.

Strategi penulisan teks ini memfokuskan pada usaha-usaha yang perlu dilakukan caleg perempuan. Upaya caleg perempuan terjun ke daerah pemilihan merupakan salah satu cara untuk, membuktikan kompetensinya pada pemilih mereka. Selain itu, perjuangan juga tetap dilakukan melalui tuntutan kebijakan hukum. Dengan menempatkan pada *apa (what)* sebagai *angle* (sudut pandang berita) Kompas mengkonstruksikan bahwa caleg perempuan memiliki kompetensi yang mampu bersaing untuk masuk ke parlemen.

Tematik, teks berita ini menempatkan sistem pemilu sebagai pihak yang bertanggung jawab. Penggunaan frase “sistem pemilu yang menerapkan suara terbanyak” pada alenia pertama berita menjelaskan bahwa sistemlah yang mengharuskan setiap caleg harus turun ke bawah. Demikian pula dengan caleg perempuan juga harus turun ke daerah pemilihannya. Sistem ini berat bagi semua caleg terlebih lagi caleg perempuan karena setiap calon wakil rakyat ternyata bukan orang yang telah dikenal pemilihnya sehingga mereka harus turun ke bawah untuk mendekati massa. Hal ini tentunya membutuhkan kemampuan modal dan tenaga yang besar. Akibatnya, penerapan suara terbanyak yang munculnya mendekati masa pilihan membuat banyak pihak tidak siap karena sistem itu mengharuskan mereka dikenal oleh pemilihnya.

Secara retorik, beberapa kata yang dipakai merupakan kata yang memberikan pemihakan pada perempuan. Penggunaan kata perempuan dianggap sebagai pernyataan bahwa hal ini tidak hanya menyangkut caleg perempuan namun juga perempuan secara keseluruhan. Kata-kata: “peluang perempuan semakin kecil” menyiratkan perempuan dengan sistem suara terbanyak inilah yang memiliki peluang semakin berat. Kata yang lain: “proses pemilu yang tidak ramah pada perempuan”, menyiratkan hal yang sama. Dari kata-kata ini menyiratkan adanya perbedaan peluang antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai kedudukan sama, karena berbeda maka Kompas sangat mendukung kelompok yang lemah. Media dalam hal ini Kompas memiliki peran untuk mensosialisasikan nilai-nilai kesetaraan gender.

Sesuai dengan peran tersebut, Kompas mencoba melawan arus dari teori bahwa media menjadi alat dari kelompok dominan tetapi media juga memproduksi ideologi dominan. Media membantu kelompok dominan menyebarkan gagasannya, mengontrol kelompok lain dan membentuk konsensus (Eriyanto, 2006: 36). Dalam hal ini, Kompas bahkan mencoba memberikan gagasan untuk mendukung kelompok yang senantiasa terpinggirkan dalam dunia politik untuk berani bersaing. Kompas mencoba mengkonstruksikan realitas sesuai dengan keinginan mereka, menjalankan peran menjadi agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya seperti yang diungkapkan oleh Tony Bennet. Dukungan Kompas terhadap perjuangan caleg perempuan secara jelas tampak dalam berita dengan judul: “Caleg perempuan jangan saling sikut”, dimuat pada harian Kompas tanggal 4 Maret 2009. Kompas secara eksplisit mendukung usaha-usaha caleg perempuan.

Kompas tampak konsisten mendukung pemberdayaan perempuan, dilihat dari judul, teks berita ini lebih memfokuskan untuk memberikan dorongan kepada caleg perempuan. Kompas menekankan kepada caleg perempuan untuk menyatukan diri dan tidak saling menjatuhkan. Penekanan Kompas ini diteruskan pada *lead* dari teks ini:

“Sesama calon anggota legislatif perempuan semestinya tidak saling sikut melainkan bersinergi. Dengan demikian, cita-cita meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen bisa terwujud.”

Narasumber dalam teks berita ini ada tiga orang yang semuanya perempuan dengan latar belakang yang berbeda; Sri Nuryanti sebagai anggota KPU, Erna Witoelar aktivis perempuan dan Irman Lanti, *programme manager* UNDP. Dilihat dari narasumbernya, tampak jelas teks berita ini memang merupakan upaya mendukung perjuangan caleg perempuan dalam pemilu. Teks berita diambil dari *angle* kegiatan Rembug Nasional Perempuan Indonesia. Kegiatan yang menurut Kompas dapat menjadi ruang konsolidasi antar caleg perempuan, sehingga ada sinergi di antara mereka. Upaya mengangkat acara tersebut merupakan salah satu pemihakan Kompas terhadap perjuangan caleg perempuan.

Dari analisis skrip, alasan (*why*) perempuan harus saling bersinergi dan tidak saling sikut disampaikan dalam alenia tiga dan empat. Seperti yang disampaikan oleh Erna Witoelar, pada alenia ketiga ... *keberadaan perempuan dalam jumlah yang lebih signifikan di parlemen memudahkan untuk melakukan perubahan. Para caleg perempuan didorong untuk bekerjasama*. Atau kutipan dari pernyataan Erna Witoelar, *kenyataannya, perempuan lebih mudah keluar dari kotak-kotak (partai politik) dan berjejaring dengan pelaku lain atau sesama perempuan*. Kutipan pendapat ini menguatkan peran perempuan dalam legislatif.

Sesuai dengan pendapat Mernissi ada dua hal yang bisa dilakukan perempuan untuk melakukan perjuangan di ruang publik (politik): pertama, dibutuhkan keberadaan organisasi yang kuat, mandiri, rasional, partisipatif, dan bebas dari bias dan cara pandang laki-laki; kedua, kecerdasan melakukan wacana atau pendominasian ide-ide transformatif dalam berbagai bentuknya. Upaya memunculkan organisasi yang kuat bukan perkara mudah namun untuk memunculkan wacana bisa dilakukan perempuan melalui media massa. Kompas dalam hal ini memberikan ruanganya untuk mendukung caleg perempuan.

Caleg perempuan mendapat perhatian dari lembaga donor (UNDP), dukungan lembaga ini diberikan dalam menggugah kesadaran masyarakat bahwa memiliki keterwakilan perempuan dalam parlemen itu penting. Dari alenia ini, maka Kompas memberikan bingkai bahwa dukungan terhadap keterwakilan perempuan di parlemen juga dilakukan oleh negara-negara lain bahkan lembaga internasional semacam UNDP. Dari narasumber UNDP tersirat acara rembug nasional ini sendiri sebetulnya mendapatkan dana dari UNDP, namun Kompas tidak menyampaikan secara eksplisit. Dengan menyamakan adanya donor, Kompas ingin mengesankan bahwa acara ini merupakan inisiatif para caleg perempuan sendiri untuk menyatukan pendapat.

Secara tematik, Kompas menyusun teks berita ini sebagai upaya mendukung usaha-usaha caleg perempuan untuk masuk dalam parlemen. Beberapa upaya yang harus dilakukan perempuan diuraikan di awal berita: *jangan saling sikut, saling bersinergi, didorong untuk bekerjasama*. Dalam alenia kelima, Kompas menyampaikan data kenaikan tentang jumlah anggota parlemen perempuan dari tahun 2004 sampai 2009. Latar ini mengisyaratkan bila perempuan melakukan usaha-usaha yang disampaikan maka terjadi peningkatan jumlah perwakilan perempuan di parlemen.

Alenia berikutnya, Kompas menekankan tentang dukungan lima negara donor terhadap perjuangan caleg perempuan. Ada koherensi antara perjuangan para aktivis dengan UNDP, yakni karena alasan perempuan lebih bisa memperjuangkan anak dan rakyat kecil. Dalam teks ini Kompas juga menekankan tentang ikrar bersama untuk para caleg perempuan untuk memperjuangkan anak-anak, keluarga miskin dan mendirikan pusat krisis korban kekerasan. Bagi Kompas, kaum perempuanlah yang memiliki peran signifikan untuk memperjuangkan kemiskinan dan anti kekerasan.

Secara retorik, penggunaan beberapa kata merupakan pemihakan terhadap caleg perempuan, contohnya: *...cita-cita meningkatkan keterwakilan perempuan*. Kata cita-cita dipakai atas nama semua perempuan, atau kalimat: *keberadaan perempuan akan memudahkan*

untuk perubahan, klaim adanya perempuan bisa memunculkan perubahan. Kata-kata ini dipakai sebagai upaya untuk mengesankan keterwakilan perempuan itu penting.

Keberadaan foto dalam teks berita untuk mendukung teks itu sendiri. *Angle* foto tentunya memiliki maksud tertentu demikian pula dengan teks ini. Penggunaan foto dalam teks berita ini lebih memfokuskan pada gambar latar (*background*) dari rembug nasional. Gambar-gambar yang berupa poster kegiatan perempuan ini memperlihatkan aktivitas perempuan, sehingga tujuan menampilkan foto ini untuk memperlihatkan berbagai aktivitas perempuan yang dapat dilakukan bila mereka menjadi wakil rakyat dan duduk di parlemen.

Simpulan

Kompas telah menjalankan beberapa peran media massa. Kompas menampilkan peristiwa yang terjadi sebagai cermin masyarakat. Kompas memiliki filter atas terjadinya peristiwa sehingga apa yang ditampilkan dalam berita bukanlah realitas sesungguhnya namun dalam bingkai Kompas.

Kompas mendukung kebijakan afirmatif caleg perempuan tetapi tidak menganggap keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang ketentuan suara terbanyak sebagai keputusan yang salah. Bagi Kompas, keputusan MK dianggap pilihan tepat untuk mengakomodasi suara rakyat. Selain itu, secara eksplisit Kompas memberikan dukungan para caleg perempuan agar terus berusaha agar bisa menduduki kursi di parlemen. Bingkai yang dilakukan Kompas ini sesuai dengan misinya untuk menjadi agen perubahan. Dengan demikian Kompas cukup konsisten dalam melakukan keberpihakan terhadap perempuan sesuai dengan misi disediakannya suplemen rubrik Swara.

Daftar Pustaka

Dzuhayatin, Siti Ruhaini, 2000, Kajian Jender di Perguruan Tinggi Islam Indonesia: Catatan dari PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (ed), *Problem dan Prospek IAIN Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, Departemen Agama RI, Ja-

- karta.
- Eriyanto, 2002, *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, LKiS, Yogyakarta.
- Fakih, Mansour, 2001, Hak Asasi Perempuan, Dalam *Jurnal Ilmu Sosial Transforma Matif Wacana, Edisi hak Asasi Manusia: Antara Skenario Kemanusiaan dan Proyek Global*, Nomor 8 Tahun II.
- Grossber, Lawrence, Ellen Wartella dan D. Charles Whitney, 1998, *Mediamaking: Mass Media a Popular Culture*, California, Sage Publications Ins.
- Hamad, Ibnu, 2004, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, Granit, Jakarta.
- Lovenduski, Joni, 2008, *Politik Berparas Perempuan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Novianti, Dewi, 2006, “Wacana Media dalam Kasus Bom Bali Pertarungan Wacana Harian Republika dan Harian Kompas dalam Kasus Bom Bali,” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4 No. 1, UPN, Yogyakarta.
- Riyadi, Dody, 2005, *Respons Organisasi Perempuan terhadap Perubahan Politik dari Era Orde Baru hingga Era Reformasi*, Tesis, UGM, Yogyakarta.
- Sudibyo, Agus, 2004, *Kepentingan Ekonomi-Politik Media*, LKiS, Yogyakarta.
- Sujipto, Ani, Kebijakan Afirmatif, Kompas 10 Februari 2009, Hal. 6
- Supriyanto, Didik, Calon Perempuan, Wassalam, Kompas 25 Agustus 2008. Hal. 12

